

ANALISIS RASIO PENGELOLAAN KEUNGAN DESA (STUDI KASUS DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA TAHUN 2016-2018) KOTA PARIAMAN

ASRUL

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumbar Pariaman
Asrulmansyur123@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to assess the financial performance of the village government in 2016-2018. The research was conducted in the Apar village government, pariaman sub-district, pariaman city. This type of research is a case study. The data collection technique was carried out using the documentation method. The data analysis technique was carried out using the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, efficiency ratio, and activity ratio. The results of this study indicate that the financial performance of Apar village when viewed from the ratio of regional financial independence is still very low. In 2016, it received a value of: 0.0%, in 2017 it received a value of 0.0%, and in 2018 it received a value of 0.0%, meaning that the dependence of Apar village with central assistance was very high in running its government system. The financial performance of Apar village when viewed from the effectiveness ratio is effective. In 2016 the value obtained was 99.50%, in 2017 it obtained a value of 99.80%, in 2018 it received a value of 99.75%, it can be concluded that Apar village is already good at realizing local revenue, so that more large of the original regional revenue budget that has been budgeted. The financial performance of Apar village when viewed from the efficiency ratio is classified as less efficient. When viewed in 2016 the financial performance of Apar village was classified as inefficient by obtaining a figure of 100%, while in 2017 it received a value of 100%, and in 2018 it obtained a value of 100%, it can be concluded that the costs incurred by Apar village for Obtaining original village income is greater than the actual village income received by Apar village. The financial performance of Apar village when viewed from the activity ratio is not good, because the allocation of funds issued by Apar village for operational expenditure is smaller than the allocation of funds spent for capital expenditure. It can be concluded that Apar village has not focused expenditure on operating expenditures which are for builders rather than for capital expenditures.*

Keywords: *Village, Regional Financial Independence, Effectiveness, Efficiency, Activities.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Desa tahun 2016-2018. Penelitian dilakukan di pemerintah Desa Apar kecamatan pariaman utara kota pariaman. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan Metode dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Aktivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar : 0,0%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 0,0%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 0,0%, artinya ketergantungan desa Apar dengan bantuan pusat sudah sangat tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio efektivitas sudah efektif. Pada tahun 2016 nilai yang diperoleh sebesar 99,50%, pada

tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 99,80%, pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 99,75%, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa Apar sudah baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, sehingga lebih besar dari anggaran pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan. Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Jika dilihat pada tahun 2016 kinerja keuangan desa Apar tergolong kurang efisien dengan memperoleh angka sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 100%, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh desa Apar untuk memperoleh pendapatan asli desanya lebih besar dari realisasi pendapatan asli desa yang diterima oleh desa Apar. Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio aktivitas tidak baik, dikarenakan alokasi dana yang dikeluarkan oleh desa Apar untuk belanja operasi lebih kecil dari pada alokasi dana yang dikeluarkan untuk belanja modal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa desa Apar belum memfokuskan pengeluaran belanja pada belanja operasi yang sifatnya untuk pembangun dibandingkan untuk belanja modal.

Kata kunci: Desa, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas.

A. Pendahuluan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berisi anggaran pendapatan belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.

Pengalokasian dana desa diharapkan agar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara rata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Hal yang menjadi prioritas dari penyaluran dana yaitu pada implementasi pengalokasian dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pelayanan dasar yang diberikan antara lain pendidikan, infrastruktur dasar dan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten atau Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yaitu empat desa paling sedikit 10%. Desa Apar merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Pariaman Utara.

Secara administratif, wilayah desa Apar memiliki batas sebagai berikut: Sebelah utara Manggung Kecamatan Pariaman Utara, Sebelah selatan Ampalu Kecamatan Pariaman Utara, Sebelah barat Samudera Hindia, Sebelah timur Tanjung Sabar

Kecamatan Pariaman Utara. Luas wilayah desa Apar adalah 96 Ha yang terdiri dari 75% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian. Jarak pusat desa dengan pusat Kota Pariaman 10 menit. Kondisi prasarana jalan utama desa semuanya telah diaspal hotmix karena desa Apar terletak pusat Pemerintah. Berdasarkan data profil Desa, jumlah penduduk desa Apar adalah 1.086. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 526, dan jenis kelamin perempuan berjumlah 511. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Apar tahun anggaran 2015-2020, pemerintahan desa berserta Badan permusyawaratan Desa bersama-sama menyusun perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam rencana pembangunan yang dituangkan dalam rencana pembangunan dalam jangka menengah desa Apar dengan melibatkan unsur masyarakat untuk menerapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa Apar untuk 5 tahun yang akan datang. Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Apar tahun anggaran 2018 mendapatkan sumber keuangan dari berbagai sumber seperti yang dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
 Pendapatan Desa Apar Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)
1	Pendapatan asli desa Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan transfer a. Dana desa b. Bagian dari hasil pajak dan redistribusi daerah c. Alokasi dana desa d. Bantuan provinsi	612.613.957,00 13.711.651,00 662.793.313,00 6.000.000,00	784.555.197,00 23.128.937,00 752.560.434,00 -	724.228.378,00 27.406.073,00 795.712.980,00 -
	Jumlah	1.295.118.921,-	1.561.244.568,-	1.547.347.431,-

Sumber : APBD Desa Apar tahun 2016-2018

Setiap tahun pendapatan desa Apar mengalami peningkatan, pada tahun 2016 pendapatan desa Apar yang bersumber dari dana pendapatan asli desa, pembiayaan berbasis hasil, dan dana desa pada tahun 2017 pendapatan desa Apar mengalami kenaikan sebesar 13%, pada tahun 2018 pendapatan desa Apar mengalami penurunan sekitar 3% yang dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pendapatan desa Apar tiap tahunnya mengalami perubahan yang signifikan karena pendapatan tersebut tidak tetap dari tahun ke tahun. Rincian pengeluaran keuangan desa Apar tahun anggaran 2016-2018 dapat dilihat dari tabel:

Tabel 2
 Rincian Anggaran Belanja Desa Apar tahun Anggaran 2016-2018

No	Bidang	2016	2017	2018
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa	471.914.964,-	648.609.947,-	686.510.180,-
2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	694.628.044,-	747.281.254,-	677.679.962,-
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	128.790.000,-	125.650.000,-	136.832.588,-
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	54.336.000,-	65.620.000,-	50.855.000,-
5	Pembiayaan Desa	-	35.000.000,-	95.000.000,-
	Jumlah	1.349.669.008,-	1.622.161.201,-	1.646.877.730,-

Sumber : APBDesa Desa Apar tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan desa sudah menjadi prioritas dengan jumlah biaya dari tahun ketahun masih belum optimalnya pada penggunaan dana desa bidang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan belum menjadi prioritas penggunaan dana desa. Tujuan Penelitian: 1) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Desa Apar Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Selama Periode 2016-2018; 2) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Desa Apar Berdasarkan Rasio Efektivitas Selama Periode 2016-2018; 3) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Desa Apar Berdasarkan Rasio Efisiensi Selama Periode 2016-2018; dan 4) Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Desa Apar Berdasarkan Rasio Aktivitas Selama Periode 2016-2018.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Rasio Kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang telah diperlukan daerah (Halim 2008: 232) secara matematis dapat disimpulkan dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandiri} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas. Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. (mahsun : 187). Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat Outputnya sektor publik. (Mahsun 2016 : 187). Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang di alokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim 2008 : 235).

C. Hasil dan Pembahasan

APBD Desa Apar tahun 2016-2018

Tabel 3 APBD Desa Apar Tahun 2016-2018

No	Keterangan	2016	2017	2018
A	Pendapatan	1.295.118.921	1.561.788.972	1.547.347.431
1	Pendapatan asli desa	0	0	0
2	Pendapatan transfer	1.295.118.921	1.560.244.568	1.547.347.431
B	Belanja	1.349.669.008	1.587.161.201	1.557.005.730
1	Belanja operasi/ tidak langsung	471.914.964	648.609.947	687.022.180
2	Belanja modal / langsung	877.754.044	938.551.254	865.367.550

Sumber : Laporan Keuangan Desa Apar

Realisasi APBD Desa Apar tahun 2016-2018

Tabel 4

Realisasi APBD Desa Apar Tahun 2016-2018

No.	Keterangan	2016	2017	2018
A	Pendapatan	1.288.679.157	1.558.801.320	1.543.617.428
1	Pendapatan asli desa	0	0	1.085.678
2	Pendapatan transfer	1.288.679.157	1.550.992.832	1.542.531.750
B	Belanja	1.283.211.600	1.514.515.250	1.319.716.391
1	Belanja operasi/tidak langsung	455.482.800	638.333.150	616.071.790
2	Belanja modal/langsung	827.728.800	876.182.100	703.644.601

Sumber : Laporan Keuangan Desa Apar

Analisis Data

Analisis kinerja keuangan desa Apar adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerja atau kegiatan desa Apar dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2016-2018. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan desa Apar adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Aktivitas. Untuk lebih jelasnya peneliti sudah menjabarkan hasil penelitian menggunakan rasio di atas sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

a. Rasio kemandirian tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman daerah}} \\
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{1.295.118.921} \times 100\% \\
 &= 0,0\%
 \end{aligned}$$

b. Rasio kemandirian tahun anggaran 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman daerah}} \\
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{1.560.244.568} \times 100\% \\
 &= 0,0\%
 \end{aligned}$$

c. Rasio kemandirian tahun anggaran 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman daerah}} \\
 \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{1.547.347.431} \times 100\% \\
 &= 0,0\%
 \end{aligned}$$

Tabel 5

Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Apar tahun anggaran 2016-2018

Tahun Anggaran	Pendapatan asli desa (Rp)	Bantuan pemerintah pusat atau provinsi (Rp)	RKKD (%)	Kriteria Kemandirian daerah menurut Moh. Mahsun
2016	0	1.295.118.921	0,0%	Rendah Sekali

2017	0	1.560.244.568	0,0%	Rendah Sekali
2018	0	1.547.347.431	0,0%	Rendah Sekali

Sumber Data : Data sudah di olah

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar : 0,0%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 0,0%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 0,0%, artinya ketergantungan desa Apar dengan bantuan pusat sudah sangat tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahnya. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan desa Apar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah desa Apar secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas untuk mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor buplik. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

- a. Rasio efektivitas tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}} \\
 \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.288.679.157}{1.295.118.921} \times 100\% \\
 &= 99,50\%
 \end{aligned}$$

- b. Rasio efektivitas tahun anggaran 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}} \\
 \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.558.801.320}{1.561.788.972} \times 100\% \\
 &= 99,80\% = 99,80\%
 \end{aligned}$$

- c. Rasio efektivitas tahun anggaran 2018

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}} \\
 \text{Rasio efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{target pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.543.617.428}{1.547.347.431} \times 100 = \frac{1.543.617.428}{1.547.347.431} \times 100 \\
 &= 99,75\%
 \end{aligned}$$

Tabel 6 Penghitungan Rasio Efektivitas Desa Apar Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun anggaran	Realisasi pendapatan (Rp)	Target pendapatan (Rp)	RE (%)	Kriteria efektivitas menurut Moh.Mahsun
2016	1.288.679.157	1.295.118.921	99,50%	Efektif
2017	1.588.801.320	1.561.788.972	99,80%	Efektif
2018	1.543.617.428	1.547.347.431	99,75%	Efektif

Sumber Data : Data sudah di olah

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan asli daerah relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio efektivitas sudah efektif. Pada tahun 2016 nilai yang diperoleh sebesar 99,50%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 99,80%, pada tahun 2018 memeproleh nilai sebesar 99,75%, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa Apar sudah baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

Rasio Efisiensi

Rasio efesiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik.

a. Rasio efesiensi tahun anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efesiensi} &= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{877.754.044}{0} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Rasio efesiensi tahun anggaran 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efesiensi} &= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{938.551.254}{0} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

c. Rasio efesiensi tahun anggaran 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efesiensi} &= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{865.367.550}{0} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 7 Penghitungan Rasio Efisiensi Desa Apar tahun anggaran 2016-2018

Tahun anggaran	Biaya pemerolehan (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	REKD (%)	Kriteria Efisiensi menurut Moh. Mahsun
2016	877.754.044	0	100%	Kurang Efisien
2017	938.551.254	0	100%	Kurang Efisien
2018	865.367.550	0	100%	Kurang Efisien

Sumber Data : Data sudah di olah

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Jika dilihat pada tahun 2016 kinerja keuangan desa Apar tergolong kurang efisien dengan memperoleh angka sebesar 100%,sedangkan pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%,dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 100%,dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh desa Apar untuk memperoleh pendapatan asli desanya lebih besar dari realisasi pendapatan asli desa yang diterima oleh desa Apar. Menurut mahsun (2016) laporan keuangan daerah dikatakan efisiensi jika skala intervalnya dibawah 100%. Dilihat dari perhitungan diatas, rata-rata presentase efektivitas keuangan desa Apar diatas 100%. dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan desa Apar dalam mendapatkan pendapatan asli daerah lebih besar dari pada pendapatan asli daerah yang diterima oleh desa Apar.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sara prasaran ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

I. Belanja operasi atau belanja tidak langsung

Rasio belanja operasi (belanja tidak langsung) merupakan perbandingan antara total belanja rutin (belanja tidak langsung) dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja (Tidak Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

a. Belanja Operasi tahun 2016

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja (Tidak Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{455.482.800}{1.283.211.600} \times 100\%$$

$$= 35,50\%$$

b. Belanja operasi tahun 2017

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja (Tidak Lasung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Total Belanja (Tidak Lasung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{638.333.150}{1.514.515.250} \times 100\%$$

$$= 42,15\%$$

c. Belanja operasi tahun 2018

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja (Tidak Lasung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{616.071.790}{1.319.716.391} \times 100\%$$

$$= 46,69\%$$

Tabel 8
 Penghitung Rasio Aktivitas Keuangan
 Desa Apar Tahun Anggaran
 2016-2018

Tahun anggaran	Total realisasi belanja (Rp)	Realisasi belanja operasi (Rp)	Belanja operasi (%)	Kriteria aktivitas Menurut Halim
2016	1.283.211.600	455482800	35,50%	Tidak baik
2017	1.514.515.250	638.333.150	42,15%	Tidak baik
2018	1.319.716.391	616.071.790	46,69%	Tidak baik

Sumber Data : Data sudah di olah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah desa Apar. Dimulai pada tahun 2016 di mana rasionya sebesar 35,50% meningkat pada tahun 2017 menjadi 42,15%, dan mengalami peningkatan menjadi 46,69% pada tahun 2018.

I. Belanja modal atau Belanja Langsung

Rasio belanja modal (belanja langsung) merupakan perbandingan antara total belanja modal (belanja langsung) dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

a. Belanja modal tahun 2016

$$\frac{\text{Rasio Aktivitas}}{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}} = \frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{877.754.044}{1.283.211.600} \times 100\%$$

$$= 68,40\%$$

b. Belanja modal tahun 2017

$$\frac{\text{Rasio Aktivitas}}{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}} = \frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{938.551.245}{1.514.515.250} \times 100\%$$

$$= 61,97\%$$

c. Belanja modal tahun 2018

$$\frac{\text{Rasio Aktivitas}}{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}} = \frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Total Belanja Modal (Langsung)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{865.367.550}{1.319.716.391} \times 100\%$$

$$= 65,57\%$$

Tabel 9
 Penghitungan Rasio Aktifitas Keuangan Daerah Desa Apar
 Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun anggaran	Total realisasi belanja (Rp)	Realisasi belanja operasi (Rp)	Belanja operasi (%)	Kreteria
2016	1.283.211.600	877.754.044	68,40%	Baik
2017	1.514.515.250	938.551.245	61,97%	Baik
2018	1.319.716.391	865.367.550	65,57%	Baik

Sumber Data : Data sudah diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Aktivitas Belanja Modal desa Apar . Dimulai pada tahun 2016 dimana rasionya sebesar 68,40% mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 61,97%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 65,57% pada tahun 2018. Menurut uraian dan

perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki desa Apar masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif besar. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih kecil dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dapat ditarik kesimpulan bahwa desa Apar belum memfokuskan pengeluaran belanja pada belanja operasi yang sifatnya untuk pembangun dibandingkan untuk belanja modal. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa desa Apar yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

D. Penutup

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Pada tahun 2016 memperoleh nilai sebesar : 0,0%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 0,0%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 0,0%, artinya ketergantungan desa Apar dengan bantuan pusat sudah sangat tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. 2) Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio efektivitas sudah efektif. Pada tahun 2016 nilai yang diperoleh sebesar 99,50%, pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 99,80%, pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 99,75%, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa Apar sudah baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, sehingga lebih besar dari anggaran pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan. 3) Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio efisiensi tergolong kurang efisien. Jika dilihat pada tahun 2016 kinerja keuangan desa Apar tergolong kurang efisien dengan memperoleh angka sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%, dan pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 100%, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh desa Apar untuk memperoleh pendapatan asli desanya lebih besar dari realisasi pendapatan asli desa yang diterima oleh desa Apar. 4) Kinerja keuangan desa Apar jika dilihat dari rasio aktivitas tidak baik, dikarenakan alokasi dana yang dikeluarkan oleh desa Apar untuk belanja operasi lebih kecil dari pada alokasi dana yang dikeluarkan untuk belanja modal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa desa Apar belum memfokuskan pengeluaran belanja pada belanja operasi yang sifatnya untuk pembangun dibandingkan untuk belanja modal.

Daftar Pustaka

- Adisasmitha, rahardjo, 2011. *Pengelolaan, pendapatan & anggaran daerah*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharmi. 1993. *Menegemen penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmaja. Dinar. 2016. Analisis pengelolaan *keuangan dan kekayaan desa (studi kasus di desa plasungan kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar)*. E-Jurnal Katalogis. ISSN 2320-2019. Volume 3. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faisal, Snafich. 1999. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Harvarindo. 2010, *pokok-pokok analisis laporan, keuangan*. Jakarta.
- Halim, Abbdul. 2008. *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta : salemba empat.
- Lapananda, Yusran, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.

- Maleong, Lexi J. 199. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Yayasan Obor Indonesia.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renacana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa anggaran 2018.
- Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Desa tahun anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sundjaja dan Inge Berlian. 2001. *Manajemen Keuangan satu*. Edisi keempat. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- T. Hani Handoko. 1997. *Manajemen edisi kedua*, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahyudi. 2015. *Perencanaan pembangunan desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman#Geografi
- http://ww.keuangan_desa.info/2015/11pokok-pokok-pengelolaan_keuangan_desa.html akses pada tanggal 7 agustus 2017.